

BAB I

PENDAHULUAN

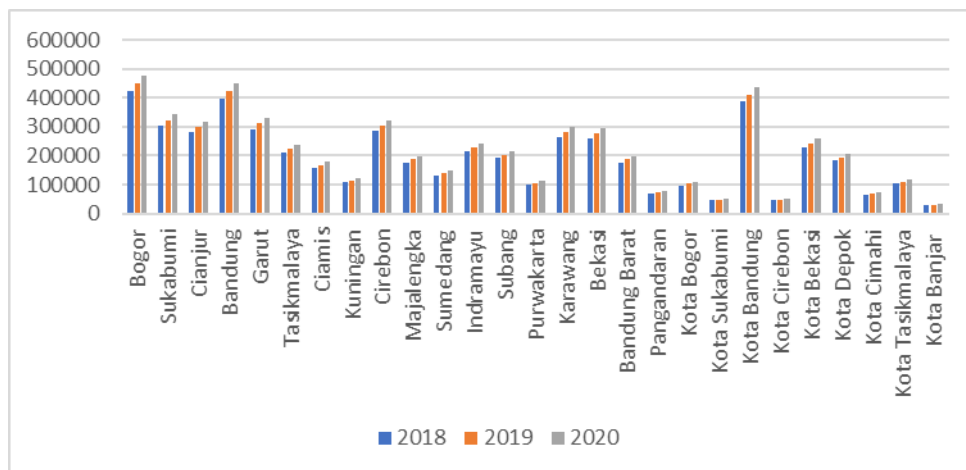
1.1 Latar Belakang

Di awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 2 bulan Maret, virus COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditemukan sudah ada di Indonesia (WHO, 2020). COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang dimulai dari adanya gejala kecil sampai ke gejala yang sangat berat. Lalu pada tanggal 3 Maret tahun 2020 kasus COVID-19 terdeteksi dan menyebar di daerah Provinsi Jawa Barat (PIKOBAR, 2022). Lalu ada kenaikan pada kasus pandemi COVID-19 sejak tanggal 3 Maret tahun 2020 sampai akhir tahun 2021 pada tanggal 31 Desember yaitu total sebesar 11495257 orang yang terkonfirmasi terkena kasus aktif virus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat (PIKOBAR, 2022).

Kasus pandemi COVID-19 ini merupakan suatu masalah yang berat sekali bagi negara-negara yang terdampak, termasuk pada negara Indonesia. Wabah ini tidak hanya semata-mata berdampak pada kesehatan saja, melainkan juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya, seperti bidang sosial seta pada bidang ekonomi. Akibat dari pandemi ini ada nya pembuatan kebijakan dari pemerintah seperti pembatasan sosial dan juga karantina di wilayah yang sedang berpotensi. Akibat dari kebijakan atau prosedur dari pemerintah supaya dapat mengurangi kegiatan di luar rumah seperti perdagangan dan lain-lain, dan ini akan menyebabkan adanya perubahan dari sisi penawaran dan permintaan dalam produktivitas ekonomi. Hal

ini lah yang dapat memperlambat perekonomian, selanjutnya akan mengakibatkan peningkatan para tingkat pengangguran.

Struktur ekonomi di Provinsi Jawa Barat didukung oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian seperti UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) yang masih berkembang pada jumlah unit usaha nya, tetapi untuk kinerja sektor UMKM ini rata-rata menurun akibat adanya pandemi. Berikut data jumlah UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2022 (diolah)

Gambar 1. 1
Jumlah UMKM Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Unit)

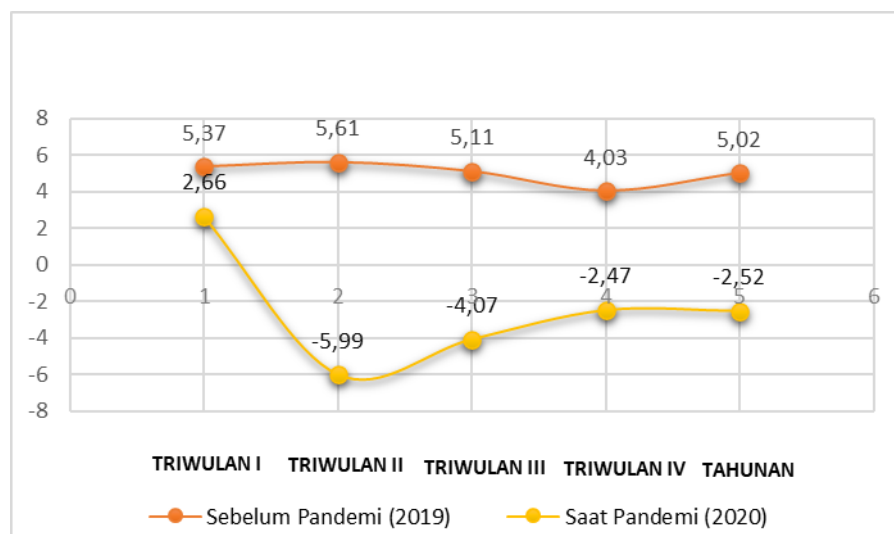
Gambar 1.1 menjelaskan bahwa perkembangan UMKM Jawa Barat dari setiap tahunnya semakin berkembang dan meningkat. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2018-2020 terbesar dialami oleh Kabupaten Bogor yang berdagang melalui

usaha kuliner. Sedangkan untuk yang terendah dialami oleh Kota Banjar yang rata-rata berdagang melalui usaha kuliner (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2022).

Pada tahun 2021 banyaknya tantangan, hambatan, dan ancaman yang terjadi. Yaitu, seperti munculnya VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*) yang tidak bisa dihindari dari dunia bisnis. Adanya kemunculan VUCA ini membuat para pelaku usaha semakin sulit untuk dapat mengembangkan inovasi bagi usahanya. Menurut laporan OECD (*Organization For Economic Co-Operation and Development*), adanya kasus COVID-19 tersebut bukan hanya krisis kesehatan saja tetapi adanya krisis ekonomi secara besar pada negara-negara terdampak, karena adanya penurunan produksi, konsumsi dan kepercayaan dari konsumen, serta pasar saham yang bereaksi secara negatif yang pada akhirnya mengarahkan kepada ketidakpastian (OECD/CFE, 2020).

Dari adanya penurunan pada produktivitas pada kegiatan ekonomi, ini akan berdampak pada penurunan perekonomian dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat serta dapat memundurkan pembangunan pada suatu negara. Keberhasilan pada pembangunan disuatu negara dapat dianalisis dari berbagai indikator, dan di antara indikator keberhasilan pembangunan yang paling penting atau paling vital disuatu negara ialah dari tingkat pengangguran dan dari pertumbuhan ekonomi. Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi naik turunnya perekonomian setiap tahunnya untuk menuju keadaan perekonomian yang membaik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator kemampuan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Setiap negara maju maupun negara berkembang akan berupaya yang terbaik untuk dapat memperbaiki perekonomiannya secara optimal. Negara Indonesia yaitu salah satu dari negara berkembang, dan sedang berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 proses aktivitas perekonomian menjadi sangat terhambat serta aktivitas masyarakat yang berkurang secara drastis dan hal ini dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi akibat adanya pandemi ini sangat terasa di Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Barat.

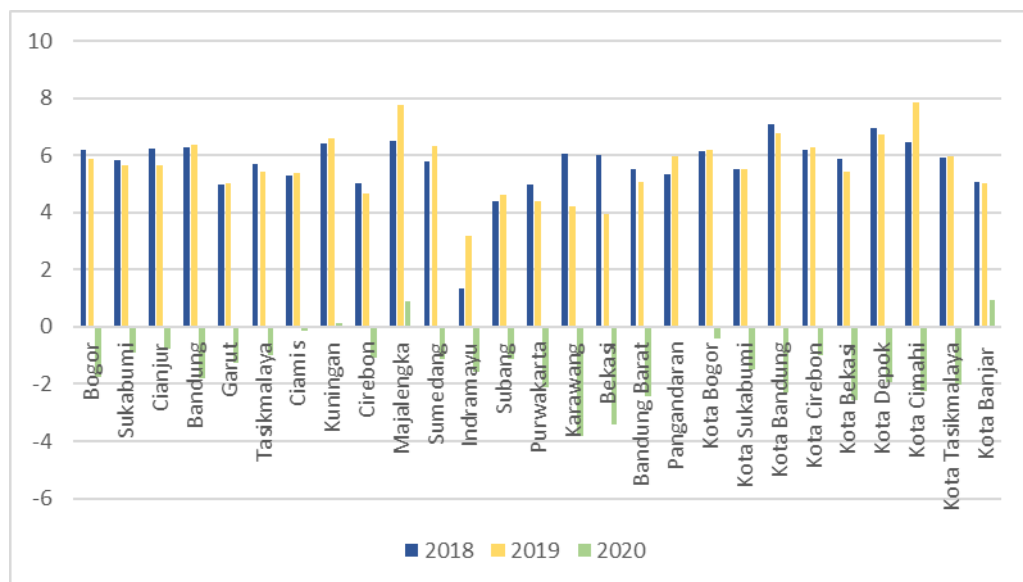


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022 (data diolah)

Gambar 1. 2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 & 2020 (%)

Diterangkan pada Gambar 1.2 bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2020 jika dilihat dari data tahunan mengalami kontraksi sebesar -2,52%

penurunan ini sangat jauh dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 5,02%. Dari data tersebut terlihat bahwa fenomena pandemi COVID-19 yang berdampak kepada aspek ekonomi. Adanya pandemi COVID-19 pemerintah membuat kebijakan-kebijakan nasional untuk menekan penyebaran kasus COVID-19, dimulai dari diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Lockdown*, karantina serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dari hal inilah akan membuat produktivitas usaha melemah serta menyebabkan tenaga kerja banyak yang diberhentikan dan dapat menimbulkan pendapatan atau pemasukan masyarakat menurun. Ketika pendapatan atau pemasukan masyarakat menurun, maka pendapatan nasional juga akan menurun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022 (data diolah)

Gambar 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (%)

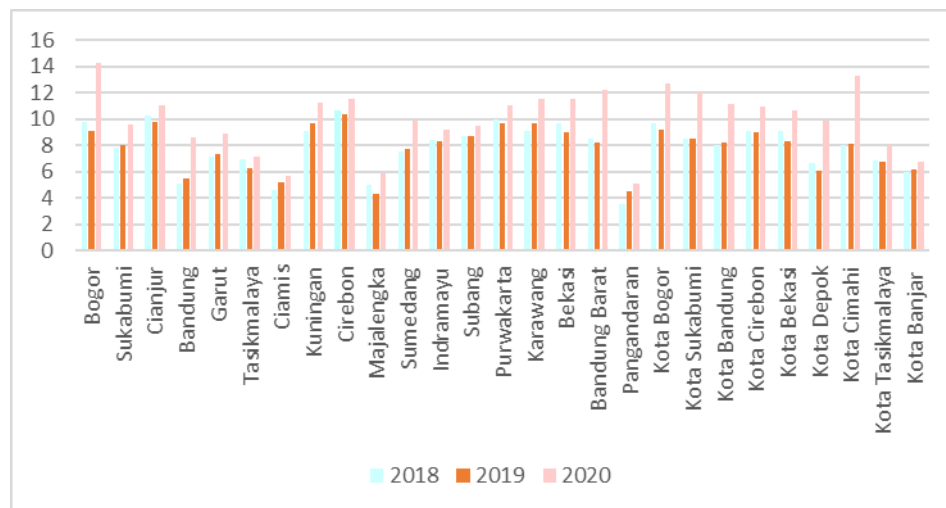
Dilihat dari Gambar 1.3 menyatakan bahwa pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dan tahun 2019 masih bertumbuh dengan stabil dan positif, dan sektor yang sangat berkontribusi di Provinsi Jawa Barat, yaitu dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 4,04% dan sektor kehutanan, perikanan serta pertanian yaitu sebesar 2,83%. Tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis akibat pandemi COVID-19. Penurunan ekonomi terdalam pada tahun 2020 dialami oleh Kabupaten Karawang yaitu sebesar -3,8% penurunan ini sangat besar dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang lainnya, pada Kabupaten Karawang ini perekonomiannya ditopang oleh sektor industri pengolahan yang sebesar 69,87% dan pada sektor perdagangan besar dan kecil atau eceran yang sebesar 9,87% (BPS Jabar, 2022).

Sedangkan untuk penurunan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu dalam dan tidak mengalami minus pada pertumbuhannya, yaitu dialami oleh Kota Banjar, yaitu pertumbuhan ekonominya tidak mengalami penurunan yang cukup dalam yaitu sebesar 0,94%. Di Kota Banjar ini perekonomiannya ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran (BPS Jabar, 2022).

Dari menurunnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kasus pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan adanya peningkatan pada tingkat pengangguran. Banyaknya tingkat pengangguran di masa pandemi ini karena ada banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawan-karyawan pada perusahaan besar sampai usaha yang paling kecil. PHK pada karyawan ini disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus

membatasi aktivitas diluar rumah, dan penutupan pusat perbelanjaan, sehingga perusahaan kecil maupun besar banyak yang tidak bisa bertahan karena kondisi ini, dan pada akhirnya harus mengambil keputusan untuk menjaga kondisi keuangan usahanya yaitu dengan cara PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada karyawannya secara besar-besaran (Indayani & Hartono, 2020).

Jika tingkat pengangguran mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat pada produktivitas suatu output serta banyak sumber daya manusia yang akan terbuang percuma. Sangat sulit untuk menghilangkan tingkat pengangguran di suatu negara, jika pengangguran tidak secepatnya diatasi maka akan menimbulkan ketimpangan sosial dan dapat memperparah kemiskinan di masyarakat, dan juga menimbulkan banyak kejahatan karena kurangnya pendapatan atau faktor kemiskinan (Hasibuan et al., 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022 (data diolah)

Gambar 1. 4
Laju Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kab/Kota di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (%)

Gambar 1.4 Menunjukkan bahwa pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran, menurut data di atas Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi tahun 2020 dialami oleh Kabupaten Bogor 14,29%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang terendah dialami oleh Kabupaten Pangandaran sebesar 5,08%.

Untuk memulihkan perekonomian di Indonesia khususnya Jawa Barat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat membuat strategi untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah telah membuat dan menetapkan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yaitu tentang kebijakan pinjaman PEN pada daerah dan juga penempatan dana di BPD (Bank Pembangunan Daerah), kebijakan-kebijakan ini menjadi sumber alternatif untuk mendukung program perbaikan ekonomi di daerah-daerah dilihat pada segi penawaran, yang dimana para pengusaha daerah lokal mendapatkan bantuan dalam bentuk pinjaman yang terjangkau dari BPD, serta pemerintah daerah memiliki pendapatan lebih supaya dapat membeli produk-produk lokal dari daerah-daerah (KemenkeuRI, 2020).

Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) serta Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat sudah menyusun kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat. Kebijakan tersebut antara lain yaitu membuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), kebijakan ini bertujuan untuk mendorong inovasi, memperluas dan mempercepat pelaksanaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), dan dapat mendorong penggabungan antara ekonomi serta keuangan digital untuk upaya

dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang dapat terintegrasi, efisiensi, transparansi, dan efektif (JabarProv, 2021).

Seiring berjalannya waktu yang diiringi dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, krisis ekonomi berangsur-angsur membaik. Walaupun sudah ada pemulihan ekonomi yang bertumbuh positif, hal tersebut belum mencapai perekonomian yang sebelum pandemi. Seperti sektor UMKM yang belum sepenuhnya pulih karena UMKM masih berjuang untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 yaitu dari kelangkaan modal, dan harus bisa memperbaiki rantai persediaan (Sugiarto, 2022).

Dari menurunnya perekonomian dari segala aspek yang diakibatkan oleh pandemi ini menyebabkan tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Dilihat dari tingginya pengangguran menyebabkan adanya tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Berdasarkan pada latar belakang, serta pemaparan data-data yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan judul pada penelitian ini **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DAN JUMLAH UMKM DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan karena adanya masalah kesehatan di masyarakat yaitu pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun yang mengakibatkan tingkat pengangguran melonjak naik.
2. Disaat pandemi Jumlah UMKM masih berkembang secara positif, tetapi pengangguran masih meningkat.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi, jumlah UMKM dan tingkat pengangguran di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sebelum dan disaat adanya pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pandemi COVID-19 terhadap jumlah UMKM di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh jumlah UMKM, pertumbuhan ekonomi dan pandemi COVID-19 dan terhadap tingkat pengangguran di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan kondisi pada pertumbuhan ekonomi, jumlah UMKM dan tingkat pengangguran di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sebelum dan disaat adanya pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pandemi COVID-19 terhadap jumlah UMKM di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah UMKM, pertumbuhan ekonomi dan pandemi COVID-19 dan terhadap tingkat pengangguran di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan informasi dari bukti penelitian serta dapat memberikan keterlibatan dalam pengembangan ilmu, khususnya kajian dan penelitian mengenai ekonomi pembangunan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sarana ide penelitian bagi pembaca dan juga peneliti lainnya supaya dapat meneliti dengan variabel dan metode yang terbaru.